

# Fraksi PD Harus Skala Prioritas PKR dan Asset

## Pontianak, BERKAT.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudianti, SE, mengatakan pada dasarnya mendukung sepenuhnya rencana Pemekaran Provinsi Kapuas Raya dan penertipan asset Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hanya saja ungkap Ary, harus ada skala prioritas, apakah dengan dibentukuknya pansus asset dan PKR, bisa selesaikan masalah, kemudian gimana dengan ketersediaan anggaran karena dalam waktu dekat ini DPRD Kalbar harus membahas APBD Perubahan 2012 disambung lagi dengan Pembahasan APBD Kalbar 2013.

Sementara sesuai dengan tata tertib DPRD Kalbar pasca penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap APBD Kalbar 2011 dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan asset yang belum terdata secara baik secara administrasi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Untuk itu DPRD Kalbar, bisa menyatakan pendapatnya dengan menggunakan Panja sebagai alat kelengkapan DPRD Kalbar bukan pansus, ini dalam



ARY PUDIANTI.

rangka menyelesaikan masalah asset.

Ary menambahkan, dalam menangani asset harus sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), dan manajemen pengelolaan asset untuk hasil audit yang lebih baik.

Mengenai hasil audit BPK-RI yang sudah disampaikan dalam paripurna istimewa DPRD tanggal (15/7) 2012, untuk tindaklanjut hasil audit tersebut sesuai dengan tatib DPRD Kalbar Bab XIII Pasal 126 ayat 7 untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK,

DPRD dapat membentuk panitia kerja.

Yang jelas kata Ary, skala prioritas menjadi pertimbangan Fraksi PD apakah menyetujui pansus atau panja untuk PKR dan Asset, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI juga menentukan untuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) Asset.

Ini papar Ary sesuai dengan Permen No. 13 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Kita di beri waktu 60 hari sesuai pasal 20 ayat 3, action plan penyelesaian 90 hari, kalau tidak ada berarti DPRD Kalbar tidak memberikan pendapat atas LHP BPK-RI 2011. Kemudian prioritas ke dua pembahasan dan tahapan APBD Perubahan 2012 dan tahapan pembahasan APBD 2013.

“Jadi sekarang masalah PKR kami dorong untuk dapat di bahas di Komisi A sedangkan masalah asset di bahas secara optimal di Komisi B DPRD Kalbar, karena

banyak agenda prioritas DPRD Kalbar lainnya, makanya kita bagi tugas, dan masalah asset dan PKR kami minta untuk mengoptimalkan pembahasannya,” kata Ary.

Sementara itu Ketua DPRD Kalbar, Minsin, SH, mengatakan untuk menyelesaikan masalah asset sehingga di tahun 2012 hasil penilaian BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cukup dengan membentuk Panitia Kerja (pokja) di internal DPRD Kalbar atau cukup Komisi A DPRD Kalbar yang membidangi masalah asset dan pemerintahan, berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini Sekda Kalbar dan Biro Keuangan dan Pengelolaan asset.

“Tidak perlu membentuk pansus asset karena kesannya politis dan permasalahan asset hanya bersifat kesalahan administrasi dan teknis,” jelas Minsin.

Namun tidak mustahil kalau benar-benar memang urgen dan mendesak dibentuk pansus ya, dibentuk pansus karena uang negara dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tata cara yang benar. (cca)